Globethics Repository



Kebenaran Hegemonik Agama

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Journal volume
Authors	Tajrid, Amir
Publisher	UIN Walisongo
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-10 03:07:52
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/154281

KEBENARAN HEGEMONIK AGAMA

Amir Tajrid
STAIN Samarinda
e-mail: tajrid_amer@yahoo.com

Abstract

Anarchic violence against jamaah Ahmadiyah and "Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB)" by Front Pembela Islam (FPI) constitutes a form of truth claim among religious groups in religious society. The religious interpretation which formerly opened now reduced to become the closed interpretation. The formerly is the substantive interpretation now become the hegemonic interpretation. This is one of the greatest theological challenge facing by religious community. This article will show the patterns of attitude and idea among religious comminity members which stimulate hegemonic truth claim in order to find out the friendly, egalitarian, and tolerant forms of religions, so the hegemonic truth claim of the religion should be avoided.

***

Kekerasan anarkis yang ditujukan kepada jamaah Ahmadiyah dan "Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB)" oleh Front Pembela Islam (FBI) merupakan bentuk klaim kebenaran di antara kelompok-kelompok agama di dalam masyarakat agama. Interpretasi agama yang sebelumnya terbuka kini menjadi tertutup. Sebelumnya interpretasinya bersifat substantif namun kini menjadi hegemonik. Inilah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh komunitas agama saat ini. Artikel ini akan membahas pla sikap dan ide di kalangan anggota komunitas yang mencetuskan klaim kebenaran yang hegemonik dalam rangka untuk menemukan bentuk keberagamaan yang bersahabat, egalitarian, dan toleran sehingga klaim kebenaran hegemonik agama dapat dihindari.

Keywords: kebenaran hegemonik, kebenaran substantif, klaim kebenaran

A. Pendahuluan

Klaim kebenaran (*truth claim*) merupakan tantangan teologis terbesar yang dihadapi oleh umat beragama dalam interaksinya dengan yang lain. Imbas dari klaim kebenaran ini seringkali terjadi penyesatan dan kekerasan terhadap pemeluk agama/keyakinan dan pandangan lain seperti yang dialami oleh jamaah Ahmadiyah dan AKKBB belum lama ini.

Dewasa ini, interaksi antar dan sesama umat beragama memang dirasakan semakin intens, seperti dalam pertemuan-pertemuan antar tokoh agama, seminar, dan bahkan dalam acara-acara bernuansa sosial. Pada tingkat pribadi, hubungan antar elit agama semakin akrab, penuh toleransi, dan terlibat dalam usaha mencairkan kebekuan yang selama ini masih dirasakan. Tetapi tunggu dulu, dalam tataran teologis masih ditemukan banyak problem. Yakni bagaimana penganut agama harus menampilkan diri di hadapan sesama penganut agama dan di tengah-tengah penganut agama lain dengan menawarkan jalan kebenaran dan keselamatan masing-masing. Tawaran jalan kebenaran dan keselamatan ini mestinya harus didasarkan pada kebenaran substantif agama dengan mengedepankan toleransi, inklusivitas, kesetaraan, dan kebebasan yang terkandung di dalamnya, tidak berdasarkan pada hegemoni kekuatan mayoritas pengikut agama. Klaim kebenaran (*truth claim*)[1] atas dasar hegemoni kekuatan mayoritas pengikut agama ini

[1] Klaim kebenaran (*truth claim*) ajaran agama secara sepihak juga dapat dipandang sebagai penyebab munculnya segregasi sosial. Ketika umat agama tertentu mengklaim ajaran agamanya paling benar, maka sesungguhnya ia telah menuduh ketidakbenaran ajaran keagamaan pihak lain. Klaim dan tuduhan seperti itu bisa muncul di antara para pengikut agama yang berbeda atau dalam satu agama, serta kelompok-kelompok yang ada dalam satu agama. Pada saat klaim dan tuduhan dilontarkan, secara tidak sadar telah terbentuk pemilahan di antara umat beragama atau kelompok di dalam satu agama. Anggapan demikian semakin dikukuhkan ketika mereka terlibat dalam kompetisi. Faktor-faktor seperti itu di satu sisi dianggap dapat memunculkan konflik di antara mereka, tetapi pada sisi yang lain mereka dapat bersatu ketika mereka merasa perlu melakukan kerja sama. Selain karena *truth claim*, segregasi sosial, menurut F. Schuon, juga dapat terjadi akibat tafsir keagamaan dan ideologi keagamaan yang dikembangkan. Karena adanya perbedaan demikian, maka masing-masing kelompok merasa perlu memiliki wadah tersendiri sehingga dengan wadah itu, dapat meneguhkan dan mensosialisasikan hasil-hasil tafsirannya. Sehingga adanya umat beragama dan kelompok keagamaan, dapat dilihat dalam konteks seperti ini. Karena *truth claim* pada akhirnya memunculkan konsep *in group* dan *out group*. Munculnya konsep ini bisa jadi akan melahirkan peluang-peluang untuk kompetisi dan konflik di antara mereka. Kompetisi dan konflik yang bergerak atas alasan agama atau faham keagamaan ataupun karena alasan kepentingan komunitas. Selengkapnya lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1982); Fritchof Schuon, *Mencari Titik Temu Agama-agama* (terjemahan) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), dan Don Sermada, "Teori tentang Fungsi Agama," dalam *Basis*, November, XXX, 1981.

memunculkan agama mayoritas dan agama minoritas. Agama minoritas seringkali menjadi objek penindasan sebagaimana yang di alami oleh jamaah Ahmadiyah. Dari sini muncul pula otoritarianisme agama, yakni klaim aliran/ kelompok sebagai yang paling berhak atas tafsir agama untuk menghakimi dan menghukum tafsir agama yang diberikan oleh orang lain seperti yang dilakukan oleh Forum Umat Islam (FUI) terhadap aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL). Fenomena klaim kebenaran yang didasarkan pada hegemoni kekuatan mayoritas pengikut agama ini setidaknya merupakan fakta yang bertentangan dengan pesan universal yang disampaikan oleh agama-agama yang ada di dunia, baik agama smitik maupun agama non smitik. Dalam konteks Islam, klaim kebenaran hegemonik agama tersebut juga mengabaikan pluralitas dan inklusivitas yang digagas oleh al-Qur'an dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW pada periode Madinah.[2] Terkait dengan fenomena ini dapat diajukan beberapa pertanyaan. Mengapa klaim kebenaran hegemonik agama muncul dan berkembang di negeri ini? Apa usaha-usaha yang harus dilakukan untuk menampilkan kembali watak agama yang ramah, egaliter, dan toleran?

Atas dasar itu, tulisan ini akan berusaha untuk menelusuri dan sekaligus memetakan sikap dan pandangan umat beragama yang memunculkan klaim kebenaran hegemonik dan berusaha untuk menampikan kembali watak agama yang ramah, egaliter, dan toleran. Sehingga klaim kebenaran hege-

---

[2] Setidaknya naskah Piagam Madinah yang telah sampai kepada kita dapat dijadikan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengusung nilai-nilai pluralitas dan ingklusifitas dalam kepemimpinannya. Di antara prinsip-prinsip umum Piagam Madinah adalah monoteisme, persatuan dan kesatuan, persamaan dan keadilan, kebebasan beragama, bela negara, pelestarian adat yang baik, supremasi hukum (syariat), serta politik damai dan proteksi. Berikut di antara cuplikan pasal-pasal dalam Piagam Madinah: (1) sesungguhnya mereka satu umat, lain dari [komunitas] manusia yang lain; (2) kaum Muhajirin dan Quraisy sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin; (3) Banu Awf, sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin; (4) Banu Sa'idah, sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin; (4) Banu al-Hars, sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Informasi lebih lengkap lihat Ibnu Hisyam, *Sirah al-Nabiyy* (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabiyy), Jil. II, t.th.; W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought* (Edinburg: Edinburg University Press, 1980), h. 160; dan Ahmad Sukarjda, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta: UI-Press, 1995).

monik agama dapat dihindarkan. Untuk mempermudah pemahaman dalam menangkap ide dan gagasan yang disampaikan, maka makalah ini ditulis dengan sistematika sebagaimana berikut, yaitu: latar belakang masalah; klaim kebenaran dan konflik kekerasan di Indonesia; sikap dan pandangan umat beragama dan usaha menampilkan kembali watak agama yang ramah, egaliter, dan toleran; dan kesimpulan.

B. Klaim Kebenaran dan Konflik Kekerasan di Indonesia

"Yang Benar" dan "kebenaran" adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama bersifat absolut-objektif, sedangkan yang kedua bersifat relatif-subjektif. Yang pertama terkait dengan Dia Yang Benar, sedangkan yang kedua terkait dengan dia pencari Yang Benar. Relativitas dan subjektivitas kebenaran setidaknya telah ditunjukkan oleh mujtahid ketika memberikan tafsir terhadap kehendak Tuhan yang termuat dalam teks-teks keagamaan. Ia mengatakan: "*ra'yi ṣawab walakin yahtamil al-khatha' wa ra'yuhu khatha' walakin yahtamil al-ṣawab* (pendapatku benar tetapi ada kemungkinan salah dan pendapatnya salah tetapi ada kemungkinan benar)." Kebenaran agama adalah milik siapa pun. Kebenaran agama tidak milik orang atau kelompok tertentu. Apabila demikian halnya, mengapa kebenaran agama kemudian di klaim terutama oleh kelompok mayoritas? Ukuran kebenaran agama tidak diukur dari substansinya tetapi di ukur dari kuantitas pendukungnya.

Pengkafiran dan penyesatan yang menimpa agama dan keyakinan minoritas di Indonesia seperti kelompok *al-Qiyādah al-Islāmiyyah*, Lia Eden, dan lainnya secara umum dilakukan oleh kelompok mayoritas seperti organisasi-organisasi keagamaan Islam dan lembaga-lembaga resmi pemerintah. Fenomena pengkafiran dan penyesatan ini juga pernah terjadi pada pengikut Darul Arqam di Malaysia. Selama logika kebenaran mayoritas ada selama itu pula pengkafiran dan penyesatan agama dan keyakinan minoritas akan terus berlangsung. Inilah wujud kebenaran hegemonik agama yang seringkali menebarkan konflik dan kekerasan.

Klaim kebenaran hegemonik agama pada perjalanan selanjutnya melahirkan konflik dan kekerasan terhadap kelompok agama dan keyakinan minoritas. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat yang dibangun oleh agama itu sendiri. Sebab secara teoritis, setiap agama oleh penganutnya diyakini mengajarkan sikap toleran, penghormatan, dan pengakuan atas

eksistensi agama dan keyakinan lain. Dalam konteks ini, Islam (dan juga agama lain) telah menegaskan toleransi, penghormatan, serta pengakuannya terhadap agama lain sebagaimana ditegaskan sendiri oleh al-Qur'an: ... *Lakum dīnukum waliya dīn* (*... bagimu agamamu dan bagiku agamaku*). Bahkan tidak hanya itu, Islam juga mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap bentuk perbedaan amaliah yang bersifat *furū'iyyah* di kalangan intern umat Islam dengan prinsip *Lanā a'mālunā walakum a'mālukum* (bagi kami amaliah kami dan bagi kalian amaliah kalian). Secara praktis, prinsip ini belum disadari sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia yang multi agama dan kepercayaan. Mereka masih enggan menerimanya secara total. Kecenderungan homogenitas dalam arti sebenarnya masih tampak dimana-mana. Masih banyak kesulitan melakukan dialog di antara kelompok-kelompok yang ada. Andaikan ada dialog, hal itu masih bersifat ceremonial dan formalistik yang belum menyentuh pada problem inti (*core problem*) yang dihadapi.

Drama konflik dan tindakan kekerasan yang diakibatkan oleh klaim kebenaran hegemonik agama terus menghiasi lembaran sejarah kehidupan bangsa yang konon sangat toleran dan akomodatif hingga hari ini. Drama konflik dan tindakan kekerasan tersebut dapat disaksikan di Indonesia dan daerah-daerah yang dulunya masuk wilayah Indonesia dari mulai konflik Baucau Timor-Timur pada Januari 1995 sampai konflik Kupang pada Desember 1998. Kesemuanya merupakan ragam konflik yang dipicu oleh SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Konflik-konflik berbasis isu agama terjadi pada beberapa kerusuhan di Surabaya pada 9 Juni 1996, Situbondo pada 10 Oktober 1996, Tasikmalaya pada 26 Desember 1996, Bekasi pada 18 September 1996, Rengas Dengklok pada 31 Januari 1997. Konflik antar etnik terjadi antara Dayak dan Madura di Sanggau Ledo Kalimantan Barat pada 30 Desember 1996 dan pada 30 Januari 1997 dan juga di Kota Waringin Timur pada 1999.[3] Kemudian konflik yang dipicu oleh isu hubungan antar kelompok juga dapat dilihat pada kasus di Timor-Timur pada 1 Januari 1995, Pekalongan pada 24 November 1995, Timika dan Nabire, Irian Jaya pada 12 Maret 1996 dan 3 Juni 1996, Banjarmasin pada 23 Mei 1997, Ujung Pandang

[3] Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, *Konflik Sosial Bernuasa Agama di Indonesia*, Seri II, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), h. 227.

pada September 1997, dan Ketapang pada 22 November 1998.[4] Tidak hanya itu, konflik dan kerusuhan juga terjadi di Mataram pada Januari 2000.[5] Konflik dan kekerasan yang terjadi di negeri ini dengan mengatasnamakan agama terus diputar oleh kelompok mayoritas agama tertentu, dan korbannya adalah kelompok minoritas.

C. Sikap dan Pandangan Umat Beragama

Berpijak pada paparan mengenai pengkafiran dan penyesatan pengikut agama dan keyakinan minoritas oleh kelompok mayoritas yang berujung pada tindakan konflik-kekerasan, ada satu pertanyaan yang dapat dimunculkan di sini: Bagaimana cara mengeliminasi klaim kebenaran hegemonik agama? Sehingga watak agama yang ramah, egaliter, dan toleran, dapat ditampilkan kembali. Untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu harus diketahui gambaran mengenai sikap keberagamaan yang ditampilkan oleh umat beragama. Mengingat sikap keberagamaan yang ditampilkan umat beragama sangat menentukan bagaimana pandangan mereka terhadap sesama dan antar umat beragama. Terkait dengan sikap keberagamaan ini, Budhi Munawar Rahman, menulis bahwa: dalam penelitian ilmu agama-agama setidaknya ada tiga sikap keberagamaan yang dapat disebutkan, yaitu: sikap eksklusivisme, inklusivisme, dan paralelisme.[6] *Pertama*, sikap eksklusif.[7] Sikap ini merupakan pandangan yang dominan dari zaman ke zaman, dan terus dianut sampai saat ini. Bagi agama Islam inti pandangan ini adalah bahwa agama dan keyakinan yang paling absah dan diterima di sisi Tuhan (Allah) adalah Islam. Beberapa ayat yang dipakai sebagai ungkapan eksklusivitas Islam adalah sebagai berikut: "*Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima* (*agama itu*) *dari padanya, dan dia di akherat termasuk orang-orang yang merugi.*"[8] *"Sungguh, agama pada Allah adalah Islam* (*tunduk pada kehendaknya*)."[9]

---

[4] Syamsul Hidayat, *Profetika* No.1, I/1999, h. ii, iii.

[5] Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, *Konflik Sosial Bernuasa Agama*...., h. 53.

[6] Budhi Munawar Rahman, *Islam Pluralis,* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 44.

[7] Informasi lebih detail terkait dengan sikap keberagamaan yang eksklusif ini silahkan lihat Hendrik Kraemer, "Christian Attitudes toward Non-Christian Religions," dalam Karl E. Braaten dan Robert W. Jenson, *A Map of Twentieth Century Teologhy, Reading from Karl Barth to Radical Pluralism* (Minneapolis: Fortress Press, 1995), p. 222-231.

[8] QS. Ali Imran [3]: 85.

[9] QS. Ali Imran [3]: 19.

Sedangkan bagi agama Kristen inti pandangan model ini adalah bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan yang sah untuk keselamatan. "*Akulah Jalan dan Kenaran dan Hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku."* [10]

Kedua, sikap inklusif.[11] Pandangan ini membedakan antara kehadiran penyelamatan dan aktivitas Tuhan dalam tradisi agama-agama lain, dengan penyelematan dan aktivitas Tuhan dalam Yesus Kristus. "Menjadi inklusif berarti percaya bahwa seluruh kebenaran agama non-Kristiani mengacu kepada Kristus". Teolog terkemuka yang menganut pandangan ini adalah Karl Rahner. Ia memunculkan satu pertanyaan: Bagaimana terhadap orang-orang yang hidup sebelum dokumen Konsili Vatikan II yang memuat pandangan inklusif itu hadir, atau orang-orang yang sesudahnya tetapi tidak pernah tersentuh injil? Untuk menjawabnya ia memunculkan istilah inklusif, *the anonymous christian*, yaitu orang-orang non Kristiani. Dalam pandangannya, mereka selamat, sejauh mereka hidup dalam ketulusan hati terhadap Tuhan, karena karya Tuhan pun ada pada mereka, walaupun mereka belum pernah mendengar kabar baik.[12] Tetapi pandangan ini dikritik oleh pandangan pluralis, sebagai yang membaca agama lain dengan kacamata agama sendiri.[13]

Sementara kalangan Islam inklusif berpandangan bahwa agama semua Nabi adalah satu. Mereka adalah saudara satu ayah; ibu mereka banyak, namun agama mereka satu. Kalangan Islam inklusif menganut pandangan al-Qur'an tentang adanya titik temu agama-agama,[14] di mana masing-masing umat telah ditetapkan sebuah *shir'ah* (jalan menuju kebenaran) dan *minhāj* (cara atau metode menuju kebenaran). Menurut kalangan Islam inklusif ini, Allah memang tidak menghendaki adanya kesamaan manusia dalam segala

---

[10] Yohanes 14: 6.

[11] Informasi lebih detail terkait dengan sikap keberagamaan yang inklusif ini silahkan lihat Karl Rahner, "Christianity and the non-Christian Relegions," dalam Karl E. Braaten dan Robert W. Jenson, *A Map of Twentieth Century Teologhy, Reading from Karl Barth to Radical Pluralism*, (Minneapolis: Fortress Press, 1995), h. 231-246.

[12] Pandangan mengenai keselamatan bagi orang yang belum tersentuh Injil ini mirip-mirip dengan pandangan Islam yang manyatakan bahwa Allah tidak akan menyiksa seseorang sampai datang kepadanya seorang utusan (QS. al-Isra' [17]: 15).

[13] Budhi Munawar Rahman, *Islam Pluralis,* h. 46.

[14] QS. Ali Imran [3]: 64.

hal (monolitisisme). Adanya perbedaan menjadi motivasi berlomba dalam kebaikan; dan Allah akan menilai dan menjelaskan berbagai perbedaan itu.[15]

Ketiga, sikap paralelisme.[16] Pandangan ini percaya bahwa setiap agama (agama-agama lain di luar Kristen) mempunyai jalan keselamatannya sendiri, dan karena itu klaim bahwa kristianitas adalah satu-satunya jalan (sikap eksklusif), atau yang melengkapi atau mengisi jalan yang lain (sikap inklusif), haruslah ditolak, demi alasan-alasan teologis dan fenomenologis. Tokoh utama yang mengemukakan pandangan pluralis ini adalah John Harwood Hicks dalam karyanya *God and The Universe Faiths* [1973].[17]

Sementara tafsir Islam Pluralis adalah pengembangan secara lebih liberal dari Islam inklusif. Banyak upaya yang ditempuh untuk mengembangkan paham Islam pluralis ini. Misalnya perbedaan antara Islam dan Kristen serta agama lain diterima sebagai perbedaan dalam meletakkan prioritas antara perumusan iman dan pengalaman iman. Menurut kalangan Islam pluralis seperti Frithjof Schuon dan Seyyed Hussein Nashr, setiap agama pada dasarnya distruktur oleh kedua hal tersebut. Hanya saja setiap agama selalu menganggap yang satu mendahului yang kedua. Persis dalam pembedaan ini, sikap pluralis bisa diterima, karena misalnya antara Islam dan Kristen perbedaannya terletak dalam menaruh mana yang lebih penting antara kedua hal tersebut. Islam mendahulukan perumusan iman (dalam hal ini adalah *tawḥīd*) dan pengalaman iman mengikuti perumusan iman tersebut. Sementara Kristen, mendahulukan pengalaman iman (dalam hal ini pengalaman akan Tuhan yang menjadi manusia pada diri Yesus Kristus, yang kemudian disimbolkan dalam sakramen misa dan ekaristi), dan perumusan iman mengikuti pengalaman ini, dengan rumusan dogmatis mengenai trinitas. Perbedaan dalam struktur perumusan dan pengalaman iman ini hanyalah ekspresi kedua agama ini, sebagaimana ungkap Nashr yang dikutip oleh Budhi Munawar Rahman, dalam merumuskan dan mengalami Tuhan yang sama.[18] Jadi pada dasarnya pandangan pluralis ini tidak menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai di

---

[15] QS. al-Ma'idah [5]: 48.

[16] Informasi lebih detail terkait dengan sikap keberagamaan yang pluralis ini silahkan lihat John Hicks, *God and the Universe Faiths,* (Oxford: One World Publications), 1993.

[17] Budhi Munawar Rahman, *Islam Pluralis,* h. 48.

[18] Pandangan pluralis ini misalnya dikemukakan oleh Seyyed Hussein Nashr dalam "The One and The Many," dalam *Parabola* terbitan 22/3/94.

depan adalah keseragaman bentuk agama. Sebab gagasan mengenai pluralisme agama berdiri di antara pluralitas yang tidak berhubungan dan kesatuan monolitik, seperti kata Raimundo Panikkar.[19]

Berdasarkan klasifikasi tiga sikap dan pandangan keberagamaan sebagaimana telah diuraikan di atas, sikap dan pandangan keberagamaan masyarakat Indonesia menurut saya masuk dalam kategori sikap dan pandangan yang pertama, yaitu sikap dan pandangan eksklusif dengan klaim bahwa agama saya-lah yang paling benar di sisi Tuhan sedangkan agama lain adalah salah/sesat, dan berarti pula anti pluralitas agama. Karena nalar yang dikembangkan oleh sikap dan pandangan ini adalah nalar agama yang tidak toleran, tidak akomodatif terhadap segala perbedaan, lebih suka mencari titik perbedaan, dan ukuran kebenaran yang digunakan adalah kebenaran mayoritas.

Pengkategorian ini didasarkan pada fakta-fakta empiris, seperti: ketegangan, konflik, kekerasan, memberikan vonis sesat terhadap kelompok lain, sampai kepada pengkafiran terhadap sesama agama. Beberapa kasus ketegangan, konflik, kekerasan, telah disinggung pada paragraf terdahulu yang ternyata jumlah mencapai bagus kasus. Untuk kasus pengkafiran misalnya telah dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri Forum Umat Islam (FUI) Indonesia terhadap Ulil Absar Abdalla, Koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL), yang dianggapnya murtad, kafir, dan melenceng dari ajaran Islam sehingga darahnya halal ditumpahkan. Padahal sama-sama membaca syahadat, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lain yang diwajibkan. Selain itu juga ada buku yang dikarang oleh Hartono Ahmad Jaiz yang intinya menuduh ada pemurtadan di IAIN. Kecenderungan keberagamaan yang monolitik seperti itu akhir-akhir ini semakin gencar dipropagandakan oleh mereka yang mempunyai sikap dan pandangan keberagamaan yang eksklusif yang selalu memancing kerusuhan, keonaran, dan bahkan memakan korban orang-orang yang tidak berdosa. Meledaknya dua hotel di Jakarta (JW. Marriot dan Ritz Carlton) beberapa waktu yang lalu disinyalir juga akibat dari sikap dan pandangan keberagamaan model ini. Akibat dari sikap dan pandangan keberagamaan model ini, kebenaran substantif agama akhirnya menjadi sesuatu yang terkorbankan. Sementara kebenaran hegemonik agama yang didasarkan pada kuantitas pengikut semakin menguat.

---

[19] Budhi Munawar Rahman, *Islam Pluralis*, h. 49.

D. Usaha Menampilkan Kembali Watak Agama yang Ramah, Egaliter, dan Toleran

Untuk mengeliminasi klaim kebenaran hegemonik agama dalam kerangka menampilkan kembali watak agama yang ramah, egaliter, dan toleran, maka harus ada upaya merubah sikap dan pandangan keagamaan masyarakat Indonesia yang semula eksklusif menjadi sikap dan pandangan keberagamaan yang pluralis. Sikap dan pandangan ini cocok untuk dijadikan sebagai alat dalam menyikapi interaksi sesama dan antar umat beragama di Indonesia. Sikap dan pandangan pluralis ini meyakini bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatannya sendiri dan tidak harus seragam. Karena itu lebih menitik beratkan pada adanya upaya pembentukan nalar agama yang toleran, akomodatif terhadap segala perbedaan, tidak menghakimi umat agama lain, dan lebih menitikberatkan pada aspek pencarian titik temu agama-agama.

Upaya merubah sikap dan pandangan keagamaan masyarakat Indonesia yang semula eksklusif menjadi sikap dan pandangan keberagamaan yang pluralis sebagai prasarat untuk mengeliminasi klaim kebenaran hegemonik agama dalam kerangka menampilkan kembali watak agama yang ramah, egaliter, dan toleran, dapat dilakukan dengan beberapa hal.

Pertama, kaharusan menggunakan metode dan pendekatan yang beragam dalam melakukan studi agama. Selama ini studi agama lebih banyak dilakukan dengan hanya menggunakan metode dan pendekatan tertentu, seperti: pendekatan teologis. Pendekatan teologis adalah pendekatan normatif, subjektif terhadap agama, yang bisa dilakukan oleh seorang penganut suatu agama dalam memahami agama orang lain dengan perspektif agama yang dianutnya. Kajian pendekatan teologis model seperti ini, menurut Amin Abdullah[20] mengarah kepada keberpihakan kepada agama tertentu, lebih bersifat eksoteris, tertutup, dan final-konkret.[21]

---

[20] M. Amin Abdullah, *Ulumul Qur'an* No. 5, VII/1997, h. 56-57.

[21] Contoh model studi dengan pendekatan ini tampak pada pengkajian al-Qur'an yang dilakukan secara tekstual yang menyimpulkan bahwa pembahasan agama-agama yang ada di dalamnya tidak lain dalam kerangka mencapai kebenaran agama Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW, sementara agama lain dinilai palsu dan telah diselewengkan para penganutnya. Kesimpulan ini didukung oleh adanya fakta tekstual bahwa al-Qur'an selalu mengajak kepada din al-Islam dan aqidah *tawḥīd* dan menyatakan dengan tegas bagi mereka yang beragama selain Islam dan menyimpang dari aqidah *tawḥīd* maka mereka tidak akan selamat dan termasuk orang yang rugi di akherat nanti. Al-Qur'an juga menyimpulkan bahwa diutusnya Nabi Mahammad SAW dengan

Selain pendekatan teologis perlu juga disampaikan di sini pendekatan falsafati yang oleh M. Amin Abdullah dinyatakan sebagai pendekatan tekstual hermeneutis dengan pola pikir kualitatif, sehingga pesan teks dapat dilihat secara lebih mendalam dari apa yang ditampilkan oleh teksnya selama tidak menyalahi prinsip-prisip universal yang diusungnya.[22] Sehingga dapat diperoleh pandangan yang terbuka, inklusif, dan abstrak, karena lebih menitikberatkan pada aspek ide-ide fundamental, yang kemudian dapat membentuk pola berfikir kritis dalam mencari esensi dan semangat suatu pesan atau data dan fakta, dan akhirnya membawa pada mentalitas, kepribadian, dan alam pikiran yang mengutamakan kebebasan intelektual, sekaligus memiliki sikap toleran terhadap berbagai pandangan yang berbeda dan terbebas dari dogmatisme dan fanatisme. Contoh model studi dengan pendekatan ini misalnya tampak pada studi agama dalam al-Qur'an yang juga merujuk pada pesan yang sama dengan pandangan teologis di atas. Hanya saja berbeda dalam mencermati pesan tersebut. Bahwa missi al-Al-Qur'an yang membawa kepada Islam dan *tawḥīd* dan *dīn al-haqq*, bukanlah Islam dalam arti agama resmi yang diakui secara historis, tetapi lebih dititik beratkan pada makna Islam dan *tawḥīd* itu sendiri, yaitu ketundukan, kepasrahan, dan komitmen tunggal hanya kepada Tuhan. Makna inilah yang merupakan petunjuk dan *dīn al-haqq* yang dibawa setiap rasul dan terdapat dalam setiap agama. Jadi al-Qur'an memang berpihak dan melakukan *truth claim*, tetapi keberpihakannya kepada ide-ide dasar keberagaman yang benar yaitu: kepasrahan, ketundukan, dan komitmen tunggal hanya kepada Allah.[23]

---

membawa petunjuk dan *dīn al-haqq* adalah untuk mengalahkan semua agama yang ada (QS., 2:28; 3:19,85; 6:19; 18:110; 22:34; 9: 33; 48:28; dan 61:9).

[22] M. Amin Abdullah, *Ulumul Qur'an* No. 5, VII/1997, h. 56-57.

[23] Penggunaan pendekatan falsafati ini lebih sering digunakan untuk membangun teologi yang lebih terbuka dan mencari persambungan atau titik temu agama-agama. Dalam konteks studi Islam, titik temu agama-agama dapat dielaborasi melalui kisah-kisah yang dilukiskan sendiri oleh al-Qur'an dengan Ibrahim sebagai tokohnya. Nama Ibrahim termaktub dalam al-Qur'an sebanyak enam puluh sembilan kali. Penyebutan sebanyak ini menunjukkan betapa pentingnya kepeloporan dan ketokohan Nabiyullah Ibrahim as. Ibrahim (Abraham) – lah sosok Nabi dan Rasul Allah yang dijadikan rujukan oleh semua agama samawi (langit); baik Yahudi, Nashrani, maupun Islam. Semua mengakui bahwa Ibrahim adalah panutan dan teladan umat beriman. Diskursus agama Ibrahim, secara panjang lebar termaktub dalam ayat 130-141 surat al-Baqarah. Firman Allah, *"... Dan tidak ada yang benci kepada millah (agama) Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami memilihnya di dunia ...."*. Ayat ini jelas memperlihatkan betapa idealnya *millah* Ibrahim bagi umat manusia. Pemakaian term *millah* memberikan distingsi (pemilahan) dengan kata *al-dīn*, sungguh pun dalam bahasa Indonesia sama-sama berarti agama. Jika al-din itu agama yang telah disertai Kitab Suci sebagai pranata ibadah dan sosial, maka al-*millah* tidak memiliki peninggalan Kitab Suci dan hanya *suhuf* (lembaran-lembaran) saja. Kemudian, bagaimana sebenarnya essensi *millah* Ibrahim sampai dijadikan tipologi keyakinan (agama) yang ideal? Dalam

Imbas masih menonjolnya pendekatan teologis dalam studi agama di Indonesia, sangat wajar apabila kemudian menimbulkan *truth claim* oleh penganut agama tertentu, tidak toleran, apologis, dan tidak terbuka, seperti yang terjadi hingga hari ini.

Selain dua pendekatan di atas, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Hidayat mengenai visi al-Qur'an tentang metode dan pendekatan studi agama-agama, setidaknya masih ada tujuh pendekatan. Kedelapan pendekatan itu adalah pendekatan historis, pendekatan kritik, pendekatan rasional intuitif, pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis, pendekatan dialogis, dan pendekatan perbandingan.[24]

Kedua, keharusan mengintensifkan dialog antar agama secara terstruktur dan terjadwal dengan baik. Tidak hanya sekedar melakukan dialog ketika telah terjadi ketegangan dan bentrokan antar pengikut agama. Dialog antar agama yang selama ini dilakukan umumnya ketika sudah dalam kondisi tersebut. Dialog yang dilakukan ketika telah terjadi ketegangan telah mengingatkan saya pada suatu peristiwa yang terjadi di Kabupaten Nunukan pada tahun 2007 antara etnis Dayak dan Bugis yang hampir saja terjadi per-

---

al-Qur'an di jelaskan bahwa karakteristik *millah* Ibrahim adalah kepatuhan dan ketundukan kepada Tuhan semesta alam sehingga manusia itu tidak akan mati, kecuali menyerahkan diri (muslim) kepada-Nya. Karenanya, *millah* Ibrahim bukanlah Yahudi, Nasrani, maupun lainnya, namun *millah* hanafiyah; yakni keyakinan yang lurus dalam memegang monotheisme yang jauh dari keyakinan dualisme Tuhan. Dengan demikian maenstream *millah* Ibrahim adalah sikap penyerahan dan ketertudukan secara totalitas terhadap hukum dan aturan Tuhan. Sikap ini sekaligus menegasikan semua kekuatan selain-Nya. Kelaliman Namrud pada masa Ibrahim as merupakan salah satu tantangan yang harus dikikis habis guna mengimplementasikan ajaran *millah*-nya. Begitu pula sikap otoritarin Azar (ayah Ibrahim) yang mengharuskan menyembah berhala. Keagungan Ibrahim bagi umat beriman sesudahnya bermuara pada plat-form *kalimatin sawa'* yang memungkinkan adanya ruang temu dari agama-agama samawi, bahkan seluruh keyakinan dan kepercayaan umat manusia. Plat-form tersebut sebagaimana dijelaskan Allah, *"... Allā na'buda illallāh walā nushrika bihi shai'an walā yattakhidha ba'ḍuna ba'ḍan arbāban min dūnillāh*" (QS. Ali Imran [3]: 64). Maksudnya, hendaknya memurnikan keyakinan dan kepercayaan hanya kepada Tuhan dan membebaskan diri dari semua relasi dan kekuatan selain-Nya. *Walhasil*, teologi yang menjadi pijakan Ibrahim adalah *'aqidah taharruriyah* (teologi pembebasan). Dari sini pula kemudia Musa as menghancurkan rezim Fir'aun dan Qarun di Mesir, Yesus melawan absolutisme raja Romawi, Muhammad SAW memerangi kelaliman kuffar Makkah. *Kalimatun sawā'* di sini dengan sendirinya membangun wacana pluralisme bagi umat manusia. Bahwa simbol-simbol atau slogan-slogan agama secara legal formal, bukanlah essensi keimanan dan kepatuhan seseorang. Apapun predikat dan label agama manusia sepanjang memegang teguh komitmen keimanan kepada Tuhan (Allah), maka dia telah tercakup dalam frame agama yang lurus (*hanifiyyah*).

[24] Syamsul Hidayat dalam *Profetika* ..., h. 136.

tumpahan darah, pada saat melakukan penelitian mengenai integrasi sosial masyarakat Kalimantan Timur. Beruntung pertumpahan darah batal terjadi berkat dialog yang diprakarsai semua pihak termasuk tokoh agama dan aparat penegak hukum di sana. Berdasarkan investigasi yang saya lakukan terhadap penduduk di sana ternyata memang dialog antar penganut agama jarang bahkan mungkin tidak pernah terjadi sebelum ketegangan tersebut terjadi. Para pemimpin agama kurang berperan dalam membangun kesadaran akan pluralitas agama yang dianut oleh masyarakat. Baru setelah ketegangan itu terjadi penggalakan dialog di antara umat agama dilakukan secara intensif.

Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk oleh pemerintah dalam konteks demikian harus terus ditingkatkan perannya yang menurut hemat saya selama ini dirasakan masih sangat kurang, karena lebih bersifat seremonial dan keberadaannya secara praksis masih terbatas pada daerah perkotaan (di tingkat kabupaten) belum menyentuh masyarakat pedesaan yang secara kultur masih berwawasan sempit sehingga mudah dipengaruhi, digiring, dimobilisasi, untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama agama. Melalui forum tersebut, dapat disampaikan berbagai pandangan mengenai kemajemukan (pluralitas) yang menjadi bagian dari realitas masyarakat dunia, yakni masyarakat yang beraneka ragam, baik agama, suku, daerah, adat kebiasaan dan sebagainya. Kemajemukan itu menimbulkan kesan keunikan dan karena keunikannya itu diperlukan yang unik pula yaitu perlakuan berdasarkan paham kemajemukan. Dalam suasana kemajemukan seperti ini diharapkan tumbuh sikap saling menerima sebagaimana adanya, komunikasi semakin intensif, tumbuh sikap bersama yang sehat, mengakui segi-segi kelebihan orang lain dan mendorong sama-sama melakukan kebajikan dalam masyarakat. Perbedaan yang ada diterima dalam kerangka perbedaan atau setuju dalam perbedaan (*agree and disagreement*).

Ketiga, penanaman sikap toleran, akomodatif, terbuka terhadap segala perbedaan, serta pluralis, harus ditanamkan mulai sejak usia dini melalui lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Tugas ini tidak semata-mata menjadi tugas orang tua tetapi juga menjadi tugas pemerintah dengan cara mengevaluasi kembali terhadap proses pendidikan dan pengajaran

akidah/keyakinan baik di tingkat sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, menyangkut materi pelajaran/perkuliahan, guru, dan dosen yang mengampu mata pelajaran/mata kuliah tersebut. Guru dan dosen yang mengampu mata pelajaran/mata kuliah tersebut harus benar-benar mempunyai wawasan yang luas dan keahlian dibidang tersebut. Dengan kata lain, guru dan dosen diwajibkan dapat membentuk sikap sebagaimana dimaksud bagi siswa/mahasiswa yang diajar dan dididiknya. Reevaluasi terhadap proses pendidikan dan pengajaran akidah/keyakinan ini sangat penting mengingat selama ini telah terjadi kesalahan dalam proses pendidikan dan pengajarannya sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam membentuk sikap toleran, akomodatif, terbuka terhadap segala perbedaan belum sepenuhnya berhasil. Misalnya guru mata pelajaran Akidah adalah lulusan Syariah bukan lulusan Ushuludin dengan konsentrasi Akidah filsafat. Menurut saya ini juga termasuk dari kesalahan kebijakan yang diwakili Departemen Agama sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Mestinya perekrutan guru itu harus terbuka, yang diterima mendaftar tidak hanya mereka yang lulusan Tarbiyah, tetapi juga lulusan lain seperti Syariah, Dakwah, dan juga Ushuluddin, disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Karena mata pelajaran agama Islam itu tidak hanya satu melainkan banyak jumlahnya. Jika ini dilakukan, maka konsekuensinya adalah harus ada kebijakan baru mengenai kurikulum yang diajarkan di fakultas-fakultas yang ada di lingkup Perguruan Tinggi Agama (PTA), yakni dengan menambah mata kuliah tentang cara dan model pengajaran di fakultas lain selain Fakultas Tarbiyah. Sehingga lulusan selain Tarbiyah juga mempunyai wawasan tentang kependidikan dan kepengajaran yang baik.

Mengingat urgensi pendidikan dan pengajaran akidah/keyakinan mestinya guru atau dosen yang diserahi tugas mengajar mata pelajaran/ matakuliah tersebut paling tidak kalau di perguruan tinggi harus bergelar doktor sedangkan di bangku sekolah dasar/menengah haruslah bergelar magister, sebagai parameter bahwa memang mereka ahli dalam bidang tersebut dan dianggap mempunyai kemampuan untuk mantransformasikan sikap toleran, akomodatif, terbuka terhadap segala perbedaan, kepada peserta didiknya.

Keempat, membuka forum kajian mengenai agama-agama yang melibatkan semua agama yang diakui dan berhak hidup dan berkembang di

negeri ini. Dalam forum ini dapat dikembangkan kajian mengenai teologi agama-agama di dunia yang selama ini mungkin masih dianggap tabu, karena sudah masuk dalam ranah dasar agama. Dengan adanya dialog teologi ini para pengikut agama semakin memahami dan mengerti konsep dasar teologi agama masing-masing dan pada saat yang sama juga mengenal dan memahami konsep dasar teologi agama lainnya. Dengan cara ini sikap saling pengertian dan hormat menghormati semakin bertambah. Dari keempat hal tersebut, diharapkan sikap dan pandangan keberagamaan masyarakat bangsa Indonesia yang secara umum dinilai eksklusif dapat berubah menjadi sikap dan pandangan yang pluralis, sehingga klaim kebenaran hegemonik agama dapat tereliminasi dan watak agama yang ramah, egaliter, dan toleran, dapat ditampilkan kembali.

E. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Pertama, klaim kebenaran atas dasar hegemoni kekuatan mayoritas pengikut agama disamping memunculkan agama mayoritas dan minoritas juga memunculkan otoritarianisme agama. Klaim kebenaran berimbas pada adanya penyesatan dan kekerasan terhadap agama minoritas. Karena itu, ia merupakan tantangan teologis terbesar yang dihadapi oleh umat beragama dalam interaksinya dengan yang lain. Konflik dan kekerasan sebagai akibat dari klaim kebenaran hegemonik agama sangat bertentangan dengan semangat yang dibangun oleh agama itu sendiri yang secara teoritis mengajarkan sikap toleran, penghormatan, dan pengakuan atas eksistensi agama dan keyakinan lain.

Kedua, sikap dan pandangan keberagamaan masyarakat Indonesia dapat dikategorikan sebagai yang eksklusif. Karena nalar yang dikembangkan adalah nalar agama yang tidak toleran, tidak akomodatif terhadap segala perbedaan, lebih suka mencari titik perbedaan, dan ukuran kebenaran yang digunakan adalah kebenaran mayoritas. Akibatnya, kebenaran substantif agama menjadi sesuatu yang terkorbankan. Sementara kebenaran hegemonik agama yang didasarkan pada kuantitas pengikut semakin menguat.

Ketiga, untuk mengeliminasinya dalam kerangka menampilkan kembali watak agama yang ramah, egaliter, dan toleran, dapat dilakukan dengan

beberapa hal: (1) keharusan menggunakan metode dan pendekatan yang beragam dalam melakukan studi agama; (2) keharusan mengintensifkan dialog antar agama secara terstruktur dan terjadwal dengan baik. Tidak hanya sekedar melakukan dialog ketika telah terjadi ketegangan dan bentrokan antar pengikut agama. Dialog antar agama yang selama ini dilakukan umumnya ketika sudah dalam kondisi tersebut; (3) penanaman sikap toleran, akomodatif, terbuka terhadap segala perbedaan, serta pluralis, harus ditanamkan sejak usia dini melalui lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Tugas ini menjadi kuwajiban orang tua dan pemerintah dengan cara melakukan reevaluasi terhadap materi akidah ditingkat pendidikan dasar, menengah, maupun kurikulum perguruan tinggi, proses pendidikan dan pengajaran, dan perekrutan tenaga pengajar serta keahliannya; (4) membuka forum kajian mengenai agama-agama yang melibatkan semua agama yang diakui dan berhak hidup dan berkembang di negeri ini. *Wallāhu a'lam*.[w]

BIBLIOGRAFI

Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, *Konflik Sosial Bernuasa Agama di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Seri II, 2003.

Hicks, John., *God and The Universe Faiths*, Oxford: One World Publications, 1993

Hisyam, Ibnu., *Sirah al-Nabiyy*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabiyy, Jil. II, t.th.

Hussein Nashr, Sayyed., "The One and The Many," dalam *Parabola* terbitan 22/3/94.

Syamsul Hidayat, Jurnal Studi Islam *Profetika*, Vol. 1, No. 1, Januari 1999

Kraemer, Hendrik., "Christian Attitudes toward Non-Christian Relegions," dalam Karl E. Braaten dan Robert W. Jenson, *A Map of Twentieth Century Teologhy, Reading from Karl Barth to Radical Pluralism*, Minneapolis: Fortress Press, 1995.

Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Rahman, Budhi, Munawar, *Islam Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Rahner, Karl., "Christianity and The non-Christian Relegions," dalam Karl E. Braaten dan Robert W. Jenson, *A Map of Twentieth Century Teologhy, Reading from Karl Barth to Radical Pluralism*, Minneapolis: Fortress Press, 1995.

Schuon, Fritchof., *Mencari Titik Temu Agama-agama,* edisi terjemahan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Sermada, Don., "Teori Tentang Fungsi Agama," dalam *Basis*, November, XXX, 1981.

Sholeh Isre, Mohammad., (ed.), *Konflik Etno Relegius Indonesia Kontemporer* Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003.

Sukarjda, Akhmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majmuk,* Jakarta: UI-Press, 1995.

Watt, W. Montgomery, Islamic Political Thought, Edinburg: Edinburg University Press, 1980.